

Efektivitas Pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis

Muhammad Sultan ¹, Kiki Endah ², Aditiyawarman ³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh

Corresponding Author: tant6040@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.573>

Article Info

Article History;

Received:

2025-05-27

Revised:

2025-06-18

Accepted:

2025-06-28

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Permasalahan utama yang diangkat adalah belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata tersebut. Kelompok kerja Pokdarwis telah dibentuk, namun belum aktif sepenuhnya dalam menjalankan fungsinya. Dinas Pariwisata juga belum sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan, serta belum maksimal dalam memberikan pelatihan seperti bimbingan teknis, pelatihan pemandu wisata, dan pembuatan souvenir khas daerah. Hal ini berdampak pada rendahnya keterampilan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan destinasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan enam informan kunci. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan pengecekan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi wisata Situ Lengkong belum sesuai dengan prinsip empat fungsi manajemen menurut George R. Terry, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya kapasitas SDM lokal, kurangnya kesadaran pengunjung terhadap pelestarian lingkungan, serta lemahnya pemahaman anggota Pokdarwis mengenai tugas mereka. Kurangnya komunikasi dan evaluasi dari pihak Dinas Pariwisata juga menjadi kendala. Meski demikian, berbagai upaya telah dilakukan, seperti pelatihan masyarakat oleh Dinas Pariwisata dan Pemerintah Desa, promosi melalui media digital dan kerja sama dengan konsultan, serta sosialisasi regulasi berbasis CHSE dan pelibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Destinasi Wisata, Dinas Pariwisata*

PENDAHULUAN

Salah satu industri yang paling tumbuh pesat secara global pariwisata menempati posisi teratas, berbagai infrastruktur, layanan masyarakat serta kewirausahaan merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan sektor pariwisata, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 (satu) Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa Pembangunan pariwisata terutama yang ditujukan untuk masyarakat bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mampu bersaing di era perubahan serta mampu memelihara nilai-nilai agama dan kelestarian budaya lokal atau daerah.

Ada beberapa aspek dalam pengelolaan potensi pariwisata di Indonesia yang bersumber dari kekayaan alam nusantara yang beraneka ragam dan mempunyai berbagai ciri khas tersendiri. Yang menjadi pondasi utama bagi Indonesia untuk mengembangkan potensi pariwisata adalah dilihat dari

karakteristik yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, sehingga dapat menjadi destinasi wisata bagi wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia.

Kabupaten Ciamis merupakan wilayah yang memiliki banyak destinasi wisata, salah satunya destinasi wisata Situ Lengkong yang lokasinya berada di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. Di Situ Lengkong pada umumnya selain mengunjungi untuk rekreasi, wisatawan yang berkunjung ke Situ Lengkong yaitu untuk berziarah dan memberikan doa di makam Prabu Hariang Kencana yang merupakan salah seorang Raja Panjalu yang tempatnya berada di Nusa Situ Lengkong.

Situ Lengkong merupakan salah satu Destinasi Wisata yang kewenangannya dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dan Pemerintah Desa Panjalu. Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 13 Tahun 2023 tentang pengalokasian bagi hasil retribusi dari Destinasi Wisata Situ Lengkong disebutkan bahwa alokasi hasil retribusi daerah ditetapkan sebesar 60% untuk Pemerintah Daerah dan 40% untuk Pemerintah Desa Panjalu. Destinasi Wisata Situ Lengkong terus dikelola seiring meningkatnya jumlah pengunjung dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, dilihat dari sarana prasarana di tempat wisata, Situ Lengkong memiliki lahan parkir yang luas, tempat beribadah yang sangat memadai, kios-kios makanan dan minuman, toilet umum, dan minimarket. Melihat kelengkapan fasilitas yang dimiliki pada Destinasi Wisata Situ Lengkong, sudah seharusnya bisa menambah pengembangan dalam Pengelolaannya. Namun pada pengelolaannya masih belum optimal karena disebabkan oleh kurangnya keterlibatan dari Masyarakat setempat dalam pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong.

Keistimewaan dan daya Tarik Destinasi Wisata Situ Lengkong salah satunya bisa dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang ingin berziarah setiap tahunnya. Tidak hanya itu, fasilitas yang tersedia maupun keramahan penduduk lokal sekitar Lokasi Destinasi Wisata, serta dukungan kolaborasi, materil serta bantuan dari pemerintah setempat, merupakan beberapa faktor keberhasilan dalam pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong. Oleh karena itu dengan banyaknya wisatawan yang mengunjungi Situ Lengkong maka akan berdampak juga pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator permasalahan sebagai berikut:

- 1) Organisasi kelompok kerja (POKDARWIS) yang mengelola Destinasi Wisata Situ Lengkong sudah ada, tetapi Pokdarwis yang sudah dibentuk belum sepenuhnya aktif dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong.
- 2) Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya untuk mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola Destinasi Wisata Situ Lengkong. Hal ini dibuktikan dengan kurang terlibatnya masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong seperti harga tiket dan Pembangunan area Destinasi Wisata sehingga keputusan yang dibuat kurang menguntungkan bagi masyarakat setempat.
- 3) Dinas Pariwisata belum sepenuhnya melaksanakan Pelatihan bagi masyarakat lokal seperti menjadi pemandu wisata (*tour guide*) serta pelatihan pembuatan *souvenir* yang menjadi ciri khas dari Destinasi Wisata Situ Lengkong. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya keterampilan masyarakat sekitar dalam partisipasi pengelolaan destinasi wisata.

Berdasarkan semua penjelasan latar belakang penelitian diatas, untuk mengetahui permasalahan implementasi sistem Desa Milenial di Desa Handapherang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Efektivitas Sistem Desa Milenial Terintegrasi Dalam Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis”.

METODE PENELITIAN

Data primer Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji Pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis secara mendalam. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial dan proses manajerial yang berlangsung di lapangan berdasarkan persepsi, pengalaman, dan interaksi para pelaku yang terlibat secara langsung. Dalam operasionalisasi konsep, fokus penelitian diarahkan pada pengelolaan destinasi wisata yang dianalisis melalui empat fungsi manajemen menurut George R. Terry (2020:15), yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Masing-masing fungsi ini dijabarkan ke dalam dimensi dan indikator yang berkaitan dengan aktivitas Dinas Pariwisata dalam pengelolaan, seperti partisipasi masyarakat, pelatihan SDM, promosi pariwisata, dan pelestarian lingkungan. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam informan kunci yang berasal dari pihak Dinas Pariwisata, pengelola Pokdarwis, dan masyarakat lokal. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi untuk melihat praktik pengelolaan yang terjadi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi dari informan terkait, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai pendukung bukti visual dan tertulis. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif, yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, yaitu proses penyaringan dan penyederhanaan data sesuai fokus penelitian, penyajian data, yaitu penyusunan data dalam bentuk naratif atau tabel agar mudah dipahami dan penarikan kesimpulan, yaitu interpretasi akhir yang dibuat berdasarkan data yang valid dan konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis selama ini belum sepenuhnya optimal. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil penelitian ditemukan permasalahan yaitu Pertama, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong masih terbatas, terutama dalam aspek operasional dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan serta pengembangan destinasi. Hal ini terlihat dari pernyataan Koordinator Destinasi, “Masyarakat sekitar itu memang dilibatkan ya, tapi cuma sebagai petugas, misalnya bantu membersihkan dan jaga tempat. Kalau untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu tidak dilibatkan”. Selain itu, pelibatan masih terfokus pada masyarakat Desa Panjalu dan belum merata ke desa lain di sekitar kawasan. Kedua, promosi keunikan Destinasi Wisata Situ Lengkong belum sepenuhnya optimal dalam menarik minat wisatawan. Hasil wawancara dengan informan dari Dinas Pariwisata menyatakan bahwa “Dinas juga masih minim tenaga profesional yang paham betul bagaimana cara mem-branding destinasi wisata” dan saat ini promosi masih mengandalkan kegiatan festival dan lomba video kreatif. Namun, promosi digital belum maksimal karena keterbatasan SDM di bidang pemasaran. Ketiga, pelestarian alam di Destinasi Wisata Situ Lengkong masih belum optimal. Walaupun sudah ada regulasi dari Dinas yang mengacu pada pedoman CHSE, pelaksanaannya belum maksimal di lapangan. Beberapa pedagang dan pengunjung masih tidak mematuhi aturan, dan jumlah petugas pengawas sangat terbatas. Informan dari POKDARWIS menyatakan, “Sudah ada aturan tentang pelestarian lingkungan, tapi ya begitu, memang belum semua orang paham dengan aturan itu”. Keempat, pembagian tugas antara Dinas Pariwisata dan POKDARWIS belum berjalan efektif. Dinas telah membagi peran secara tertulis, namun dalam praktiknya masih terjadi tumpang tindih. Seperti diungkapkan oleh pengurus POKDARWIS: “Pembagian tugas itu kadang tidak jelas, kebanyakan diambil alih sama Dinas”. Hal ini diperkuat hasil observasi bahwa komunikasi dan panduan kerja belum dijalankan secara rutin dan menyeluruh. Kelima, Dinas Pariwisata belum optimal dalam menjalankan

fungsi promosi dan penyediaan fasilitas. Fasilitas pendukung seperti toilet dan tempat sampah belum tersedia secara merata, dan pengelola di lapangan belum memiliki latar belakang pariwisata yang memadai. Keenam, efektivitas aturan POKDARWIS belum berjalan maksimal meskipun ada dasar hukum yang jelas melalui Perda No. 9 Tahun 2022. Masih ditemukan lemahnya pengawasan dari Dinas, serta kurangnya pembinaan dan pelatihan SDM. Sebagaimana pernyataan informan, “POKDARWIS sudah punya aturan dari Perbup, tapi di lapangan penerapannya masih lemah”. Ketujuh, motivasi yang diberikan Dinas Pariwisata kepada pengelola belum menyeluruh. Walaupun Dinas memberikan penghargaan, implementasinya belum menyentuh seluruh kebutuhan pengelola secara maksimal. Sebagian pengelola merasa belum yakin akan peran strategis mereka. Kedelapan, arahan kepada pemandu wisata belum spesifik dan belum sesuai dengan kondisi lokal. Arahan yang bersifat umum dan belum disesuaikan dengan keunikan Situ Lengkong membuat kegiatan pendampingan kurang efektif. Kesembilan, komunikasi antara Dinas Pariwisata dan pihak terkait belum terstruktur dan berkelanjutan. Informasi sering terlambat karena tidak adanya petugas khusus komunikasi antar instansi dan belum ada jadwal koordinasi yang rutin. Hal ini diakui oleh beberapa pihak seperti Koordinator Destinasi dan POKDARWIS, “Komunikasi itu cuma pas di lapangan aja, contohnya pas lagi ada kegiatan”. Kesepuluh, belum semua elemen pengelola memiliki keyakinan dan kesiapan untuk memenuhi target pengembangan wisata. Hal ini dikarenakan belum meratanya pelatihan, lemahnya motivasi, dan kurangnya kejelasan peran antar lembaga pengelola. Dengan demikian, semua permasalahan tersebut diperkuat oleh data hasil wawancara dan observasi lapangan yang menunjukkan perlunya pembenahan dalam pengelolaan destinasi wisata, terutama dalam aspek partisipasi, promosi, pelestarian, koordinasi, dan pelatihan SDM secara lebih terstruktur, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Hambatan-hambatan yang muncul dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis antara lain: Kapasitas sumber daya manusia masyarakat lokal masih rendah, terutama dalam hal manajemen wisata, pelayanan, promosi, dan pemahaman tentang pengelolaan pariwisata yang profesional. Kurangnya kesadaran serta keterlibatan aktif dari pengunjung dan pelaku wisata, ditambah dengan keterbatasan sosialisasi dan pengawasan di lapangan, menyebabkan penerapan aturan pelestarian lingkungan belum konsisten. Kurangnya pemahaman anggota POKDARWIS tentang tugas dan tanggung jawab mereka, minimnya komunikasi serta evaluasi rutin dari Dinas Pariwisata, serta keterbatasan sumber daya manusia dan akses wilayah menjadi kendala utama. Kurangnya tenaga ahli di bidang pariwisata dan pemasaran, minimnya koordinasi antar instansi, serta keterbatasan pengetahuan teknis dari petugas pengelola di lapangan menghambat efektivitas pengelolaan destinasi wisata. Terbatasnya anggaran dan lemahnya pengawasan serta bimbingan dari Dinas Pariwisata, keterbatasan anggaran menghambat pelaksanaan program motivasi dan pembinaan menyebabkan program penghargaan, pembinaan, dan pelatihan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, bahkan seringkali tertunda atau tidak berjalan sesuai rencana. Minimnya penyebaran informasi. Kurangnya kesadaran pemandu, serta belum adanya SOP khusus untuk Situ Lengkong. Terbatasnya pelatihan, fasilitas, dan dukungan anggaran untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara menyeluruh serta Belum adanya penjadwalan komunikasi rutin serta keterbatasan sumber daya dan teknologi komunikasi, Pelaksanaan arahan masih terhambat oleh keterbatasan kesiapan infrastruktur dan respon mendadak terhadap program.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis antara lain: Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis bersama Pemerintah Desa Panjalu telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong. Salah satunya melalui pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat lokal, dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan profesionalisme mereka agar dapat terlibat lebih aktif dalam pengelolaan wisata. Sekretaris Dinas menyatakan: “Dinas Pariwisata melakukan kerja sama dengan Pemerintah Desa Panjalu, memberikan

kewenangan kepada pihak desa untuk merekrut warga lokal sebagai tenaga pengelola. Untuk mengatasi kendala kapasitas, Dinas menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat lokal agar keterlibatan mereka lebih efektif dan profesional.” Dalam aspek promosi, Dinas Pariwisata melakukan berbagai inovasi, seperti lomba video kreatif dan promosi digital, serta bekerja sama dengan konsultan profesional untuk meningkatkan kualitas penyusunan materi promosi. Hal ini dikonfirmasi oleh informan: “Promosinya dilakukan dengan konten digital, menonjolkan unsur religi dan keindahan alam. Tapi karena kurang tenaga profesional, Dinas menjalin kerja sama dengan konsultan agar promosi lebih efektif.” Upaya lain adalah menyusun regulasi berbasis pedoman CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment), yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat, pengelola, dan pengunjung. Kelompok pemuda dan sekolah juga mulai dilibatkan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar kawasan wisata. Untuk meningkatkan efektivitas pembagian tugas, Dinas menyusun panduan kerja tertulis, melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada POKDARWIS, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Seperti disampaikan informan POKDARWIS: “Dinas sudah membuat panduan kerja, tapi pembagian tugas kadang belum jelas. Sosialisasi masih kurang, makanya kami perlu pelatihan lebih lanjut supaya tahu tanggung jawab masing-masing.” Dinas juga menjalankan program promosi berkelanjutan melalui acara budaya serta mulai merekrut tenaga profesional untuk mendukung pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Keterbatasan anggaran diatasi melalui pengajuan tambahan dana kepada Pemerintah Kabupaten, yang ditujukan untuk mendukung program motivasi, pelatihan, dan insentif bagi para pengelola. Hal ini penting mengingat salah satu informan menyebutkan: “Dinas kadang ngasih penghargaan, tapi dananya terbatas. Jadi belum semua program bisa jalan. Harapannya Dinas bisa ajukan anggaran lebih agar pelatihan bisa rutin.” Dinas Pariwisata juga menjalin MoU dengan masyarakat dan UMKM, memberikan SOP yang disosialisasikan melalui pemerintah desa, serta merancang perjanjian tanggung jawab bersama antar pihak untuk memperkuat kerja sama.

Upaya-upaya ini sejalan dengan temuan dalam penelitian Putra dan Handayani (2022) yang dimuat dalam Jurnal Pariwisata Pesona Indonesia, yang menyatakan bahwa pelatihan masyarakat lokal, promosi digital, dan koordinasi lintas sektor merupakan tiga pilar utama dalam penguatan tata kelola destinasi wisata berkelanjutan. Dalam konteks Situ Lengkong, kerja sama dengan konsultan profesional dan pelibatan UMKM telah mengarah ke model community-based tourism. Selain itu, hasil penelitian ini juga menguatkan teori George R. Terry (2020) tentang manajemen, terutama pada fungsi actuating dan controlling, di mana penggerakan dan evaluasi sumber daya dilakukan secara bertahap namun belum menyeluruh. Penelitian oleh Rahayu & Kurniawan (2021) dalam Jurnal Kepariwisata Nusantara juga menekankan pentingnya pemberdayaan kelompok sadar wisata melalui pelatihan dan SOP berbasis lokal. Kondisi POKDARWIS Situ Lengkong yang masih belum merata dalam pemahaman dan pelaksanaan tugas menunjukkan bahwa praktik ideal ini masih dalam tahap pembenahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong belum berjalan optimal, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil penelitian ditemukan permasalahan yaitu: Partisipasi masyarakat masih terbatas dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Promosi wisata belum optimal karena kurangnya strategi pemasaran yang profesional. Pelestarian lingkungan di Destinasi Wisata Situ Lengkong belum maksimal akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ada. Pembagian peran antara Dinas Pariwisata dan POKDARWIS tidak jelas sehingga menimbulkan ketidaktahuan tugas yang harus dilakukan. Dinas Pariwisata belum berjalan optimal dalam hal promosi, penyediaan fasilitas yang sudah dibangun namun belum

- diresmikan, pemberian motivasi kepada pengelola di lapangan, hingga arahan teknis kepada pemandu wisata dan pelibatan masyarakat yang masih terbatas secara menyeluruh.
- 2) Hambatan utama meliputi rendahnya kapasitas SDM lokal dalam hal manajemen, pelayanan, dan promosi pariwisata, serta kurangnya tenaga profesional di bidang perencanaan dan branding. Kurangnya kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dan pengunjung, lemahnya pemahaman anggota POKDARWIS terhadap pengelolaan, minimnya koordinasi dan komunikasi antar pihak, serta keterbatasan anggaran, pelatihan, dan infrastruktur juga menjadi penghalang serius. Keterbatasan SOP, informasi, dan teknologi komunikasi yang menghambat efektivitas pelaksanaan program yang telah direncanakan, termasuk dalam penyebaran arahan dan pengawasan kegiatan pengelolaan destinasi.
 - 3) Upaya untuk mengatasi hambatan Pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong yaitu: Dinas Pariwisata dan Pemerintah Desa melakukan pelatihan, pembinaan, dan peningkatan keterampilan masyarakat lokal. Upaya promosi dilakukan melalui media digital, lomba kreatif, dan kerja sama dengan konsultan profesional. Sosialisasi regulasi berbasis CHSE serta pelibatan kelompok masyarakat dalam pelestarian lingkungan diperkuat. Penyusunan panduan kerja, pelatihan POKDARWIS, peningkatan koordinasi, serta pengajuan tambahan anggaran turut dilakukan. Selain itu, Dinas menjalin kerja sama melalui MoU, menyusun SOP, memberikan pelatihan kepada UMKM, dan memperkuat komunikasi lintas sektor untuk mendorong pengelolaan destinasi yang berkelanjutan dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aditiyawarman, Suparman AN, Ulzanah SN. Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Mangrove Oleh Pemerintah Desa Babakan Pangandaran. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*. 2024;2(3):107-123.
2. Afriza R, Yuska D, Yuniarti E. Moringa oleifera addition to pudding on organoleptic test and nutritional content. *Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIKA)*. 2023;5(1):170-180. doi:10.36590/jika.v5i1.399
3. Alawiyah YH. Pengaruh pengelolaan kelas terhadap efektifitas pembelajaran. Bogor: Universitas Djuanda; 2022.
4. Auliza R. Strategi pengelolaan destinasi wisata oleh Dinas Pariwisata Kota Lhokseumawe. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry; 2022.
5. Daryati I, Nasution MS. Pengelolaan objek wisata Tangsi Belanda oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*. 2022;1(3):165-177. doi:10.55606/jhps.v1i3.582
6. Endah K, Budiawan A, Galuh U, Banjaranyar D, Banjaranyar K, Ciamis K, et al. Analisis Pengelolaan Wisata Berbasis Smart Tourism Di Desa Banjaranyar Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. 2024;10:478-486.
7. Endah K, Budiawan A, Gusmoi T, Nurwanda A, Sujai I. Pelatihan Ekowisata Berkelanjutan Untuk Masyarakat Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Alam di Desa Sadewata Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. *Jurnal Abdimas Indonesia*. 2021;1(2):26-32.
8. Fitriani A, Savira A. Strategi pengembangan potensi wisata Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Al-Hikmah*. 2020;18(2):135-150. doi:10.35719/alhikmah.v18i2.30
9. Gunn CA, Var T. *Tourism planning: Basics, concepts, cases*. London: Psychology Press; 2004.
10. Mathieson A, Wall G. *Tourism: Economic, physical, and social impacts*. London: Longman; 2002.

11. Nasrullah, Widodo ML, Yuniarti E, Faried AI, Suryani W, Hesty RS, et al. Perencanaan destinasi pariwisata. Karim A, editor. Medan: Yayasan Kita Menulis; 2023.
12. Partomo. Formulasi strategi pengembangan ekowisata di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Bogor: IPB; 2004.
13. Ratnasari A, Endah K, Sunarti N. Pengembangan potensi pariwisata di Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. FISIP Universitas Galuh. 2022;2(1):1621-1640.
14. Ruray SB. Tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup: Sebuah studi di Provinsi Maluku Utara. Bandung: Alumni; 2012.